

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS
PERMINTAAN PENYIDIK TERHADAP EMERITUS NOTARIS**

Nama : Della Arrilia

Jurusan/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan

Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Abstrak

Penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk pemeriksaan harus mendapat persetujuan dari MKN, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Emeritus Notaris. Padahal ketentuan tersebut bermakna persetujuan untuk mengambil suatu Akta Notaris beserta Notaris yang membuat akta tersebut dan bagaimana jika Notaris yang membuat Akta tersebut sudah pensiun / Emeritus Notaris. Permasalahannya apakah MKN berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik terhadap Emeritus Notaris lalu bagaimana perlindungan hukum bagi Emeritus Notaris oleh MKN atas permintaan penyidik. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yaitu secara normatif MKN tidak diberikan kewenangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik atas pemanggilan Emeritus Notaris. Perlindungan hukum bagi Emeritus Notaris oleh MKN atas permintaan penyidik terhadap pemanggilan Emeritus Notaris mendasarkan pada Pasal 65 UUJN Perubahan bahwa Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Atas dasar ketentuan Pasal 65 UUJN Perubahan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik atas pemanggilan Emeritus Notaris perlu dilakukan perubahan Pasal 66 UUJN Perubahan.

Kata kunci : Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Emeritus Notaris

THE AUTHORITY OF THE NOTARY IN GIVING APPROVAL OR REJECTION OF NOTARY EMERITUS AT THE REQUEST OF INVESTIGATORS

Name : Della Arrilia

Dicipline/Study Programme : Law/Master of Notary

Contributor : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Abstract

Investigators in taking a photocopy of the deed minuta and calling a Notary for examination must obtain approval from the MKN, but the provision does not apply to the Emeritus Notary. Though the provision means approval to take a Notary Deed along with the Notary Who made the deed and what if the Notary who made the Deed is retired / Emeritus Notary. The question is whether the MKN is authorized to give approval or rejection of the investigator's request to the Emeritus Notary and then how the legal protection for Emeritus Notary by mkn at the request of investigators. This research is normative juridical law research with conceptual and legislative approaches. The results of the study are normatively mkn is not given authority in giving approval or rejection of the investigator's request for the summons of Emeritus Notary; Legal protection for Emeritus Notary by mkn at the request of the investigator against the summons of Emeritus Notary based on Article 65 UUJN Amendment that the Notary shall be responsible for every deed he made even though the Notary Protocol has been submitted to the depositor of the Notary Protocol. On the basis of the provisions of Article 65 UUJN The amendment is to provide legal certainty and legal protection in giving approval or rejection of the investigator's request for the summons of the Emeritus Notary needs to be amended Article 66 UUJN Amendment.

Keywords : Authority, Notary Honorary Assembly, Emeritus Notary